

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Strategi Pemerintah**

Strategi pemerintah merupakan serangkaian rencana dan kebijakan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam tata kelola negara serta menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Mintzberg et al., 2005). Strategi ini mencakup penetapan visi, analisis situasi, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi guna memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks perbaikan pemukiman ilegal di Kota Batam, strategi pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang diambil mampu menangani permasalahan sosial-ekonomi serta meminimalisir konflik antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak (Friedmann, 1987). Penanganan pemukiman ilegal memerlukan pendekatan kolaboratif, kebijakan berbasis data, serta komitmen dalam implementasi program perbaikan lingkungan permukiman (Turner, 1976).

Pemerintah memulai strategi penanganan pemukiman ilegal dengan menetapkan tujuan dan prioritas yang jelas, seperti menciptakan hunian yang layak, menata ruang kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UN-Habitat, 2016). Penetapan tujuan ini harus disertai dengan analisis menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan legalitas kepemilikan lahan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang harus diatasi (Payne, 2002). Kota

Batam menghadapi tantangan berupa dinamika pertumbuhan pemukiman ilegal yang cepat serta ketidakpastian hukum bagi penghuni kawasan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan yang relevan, seperti program relokasi, legalisasi kawasan tertentu, atau pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman (De Soto, 2000). Kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi, kesiapan anggaran, serta penerimaan masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif.

Setelah kebijakan ditetapkan, implementasi dilakukan melalui lembaga pemerintah yang relevan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan masyarakat terdampak (Healey, 1997). Langkah-langkah implementasi ini dapat mencakup pemetaan wilayah, program peremajaan kota, serta insentif bagi masyarakat yang bersedia berpartisipasi dalam skema perbaikan pemukiman. Selain itu, strategi pemerintah dalam menangani pemukiman ilegal juga menuntut adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil (Ostrom, 1990). Dalam kasus Batam, koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani masalah pemukiman ilegal.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan, strategi pemerintah harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memberikan rekomendasi perbaikan

dalam pelaksanaan program perbaikan pemukiman ilegal (World Bank, 2018). Permasalahan pemukiman ilegal di Batam merupakan isu kompleks yang membutuhkan pendekatan strategis dari pemerintah. Dengan meningkatnya jumlah permukiman ilegal serta dinamika permasalahan yang dihadapi, pemerintah perlu merancang strategi yang fleksibel dan adaptif untuk mengatasi persoalan ini secara efektif. Mengacu pada berbagai teori strategi pemerintahan dan pengalaman dari negara lain, pemerintah Kota Batam dapat menerapkan kebijakan berbasis data, membangun koordinasi lintas sektor, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain perencanaan strategis, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam efektivitas strategi pemerintah. Menurut Healey (1997), kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mempercepat implementasi kebijakan serta meningkatkan efektivitas program perbaikan pemukiman ilegal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep governance yang menekankan pada keterlibatan berbagai aktor dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Ostrom, 1990). Dalam konteks Kota Batam, di mana pertumbuhan pemukiman ilegal dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan urbanisasi pesat, strategi kolaboratif dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan kota dengan hak-hak masyarakat yang bermukim di kawasan informal.

Monitoring dan evaluasi kebijakan juga menjadi bagian penting dari strategi

pemerintah. World Bank (2018) menekankan bahwa kebijakan penataan pemukiman ilegal harus disertai dengan mekanisme evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat, analisis perubahan sosial-ekonomi, serta pemantauan terhadap keberlanjutan kebijakan yang telah diterapkan (Friedmann, 1987). Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan dinamika perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi pemerintah dalam penataan pemukiman ilegal tidak hanya berfokus pada aspek regulasi dan penertiban, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Dengan menerapkan pendekatan yang sistematis, berbasis data, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menangani permasalahan pemukiman ilegal di Kota Batam.

### **2.1.2. Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan pemerintah dalam menangani pemukiman ilegal merupakan kajian yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor serta aktor yang berperan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat (Dye, 2017).

Dalam penerapannya, Teori Kebijakan Publik terdiri dari beberapa aspek utama. Konsep dasar teori ini menyoroti bagaimana masalah publik dikenali dan

didekati oleh pemerintah dengan mempertimbangkan faktor politik, birokrasi, serta dinamika sosial yang ada (Birkland, 2019). Proses kebijakan mencakup tahapan mulai dari identifikasi masalah, penetapan agenda, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Setiap tahap dalam proses ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang (Anderson, 2014). Selain itu, teori kebijakan publik juga menawarkan berbagai model pengambilan keputusan, seperti model rasional komprehensif yang menekankan evaluasi menyeluruh terhadap alternatif kebijakan, model inkremental yang mengedepankan perubahan bertahap, model garis besar yang menetapkan arah kebijakan secara umum, serta model proses kebijakan yang melihat keputusan sebagai hasil interaksi antara berbagai aktor dan institusi (Lindblom, 1959; Sabatier, 2007).

Analisis kebijakan dalam teori ini juga mencakup evaluasi dampak kebijakan, distribusi manfaat dan beban, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan meliputi kekuasaan politik, struktur pemerintahan, sumber daya finansial, opini publik, nilai-nilai budaya, serta kepentingan kelompok yang berperan dalam proses pengambilan keputusan (Kingdon, 2011). Dengan memahami teori kebijakan publik, para pengambil keputusan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan publik serta meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, teori ini juga berperan penting dalam mendorong akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih

inklusif dan berkelanjutan (Weimer & Vining, 2017).

Dalam konteks pemukiman ilegal, kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik, serta aspek hukum guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasinya (Anderson, 2010). Teori kebijakan publik berfokus pada bagaimana masalah publik diidentifikasi, dianalisis, dan diatasi melalui keputusan yang diambil oleh pemerintah. Proses ini mencerminkan keterlibatan berbagai aktor, termasuk lembaga pemerintah, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil (Parsons, 1995). Teori kebijakan publik juga menekankan peran struktur birokrasi dan kekuatan politik dalam menentukan arah kebijakan serta mekanisme implementasinya (Dunn, 2018).

### **2.1.3. Tata Kelola Perkotaan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (WCED, 1987). Konsep ini menekankan keterkaitan erat antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan. Dengan menjaga keseimbangan antara ketiga dimensi tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Prinsip utama pembangunan berkelanjutan meliputi integrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus berjalan seimbang. Pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan untuk mencegah degradasi alam dan ketimpangan

sosial (Barbier, 1987). Selain itu, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya (Meadows et al., 2004). Keberlanjutan pembangunan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan agar kebijakan yang diambil relevan serta lebih efektif dalam penerapannya (Pretty, 1995).

Dimensi sosial pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (UNDP, 2020). Sementara itu, dimensi ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri ramah lingkungan (Sachs, 2015). Dimensi lingkungan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi ekosistem (Rockström et al., 2009).

Implementasi pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, seperti regulasi lingkungan dan insentif ekonomi bagi industri hijau (OECD, 2018). Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan yang ramah lingkungan (Sterling, 2001). Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi (UN, 2015).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat tanpa mengorbankan

keberlanjutan lingkungan dan sumber daya bagi generasi mendatang. Konsep ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan.

#### **2.1.4. Pemukiman Ilegal**

Pemukiman ilegal merujuk pada hunian yang dibangun tanpa izin resmi di atas lahan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Pemukiman ini sering kali muncul di tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan lain, seperti milik pemerintah, lahan pertanian, atau daerah dengan risiko bencana tinggi (UN-Habitat, 2020). Keberadaan pemukiman ilegal menjadi permasalahan serius dalam tata kelola perkotaan, terutama di negara-negara berkembang yang mengalami pertumbuhan populasi cepat dan urbanisasi yang tidak terkendali.

Faktor utama yang mendorong terbentuknya pemukiman ilegal meliputi tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, serta kelemahan dalam regulasi tata kota. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi penyebab utama, di mana masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membeli atau menyewa hunian yang sesuai dengan standar perumahan resmi. Selain itu, urbanisasi yang pesat tanpa diimbangi oleh penyediaan perumahan yang memadai mendorong masyarakat untuk mencari alternatif tempat tinggal di lokasi yang tidak sah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan pemerintah serta ketidakjelasan hukum mengenai hak kepemilikan tanah juga berkontribusi terhadap maraknya pemukiman ilegal (Durand-Lasserve & Royston, 2012).

Pemukiman ilegal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, pemukiman yang dibangun di atas tanah tanpa hak kepemilikan atau izin resmi dari otoritas terkait. Kedua, pemukiman yang berdiri di kawasan terlarang, seperti daerah konservasi atau wilayah rawan bencana yang tidak diperuntukkan bagi hunian. Ketiga, pemukiman yang dibangun dengan material yang tidak layak, menyebabkan kondisi hidup yang tidak aman dan berisiko terhadap kesehatan penghuninya (Davis, 2006).

Dampak dari keberadaan pemukiman ilegal sangat luas dan kompleks. Dari segi sosial, pemukiman ilegal sering kali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, serta meningkatnya angka kriminalitas. Dari segi lingkungan, pemukiman ilegal dapat menyebabkan degradasi lingkungan akibat pembangunan yang tidak terencana, deforestasi, pencemaran air, dan risiko banjir akibat sistem drainase yang buruk. Dari segi ekonomi, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatur pajak dan retribusi dari kawasan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pemukiman ilegal juga menghambat pengembangan infrastruktur kota yang berkelanjutan dan merencanakan tata ruang yang lebih tertata (UN-Habitat, 2020).

Mengatasi permasalahan pemukiman ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perumahan yang inklusif, seperti program perumahan subsidi dan sistem kepemilikan lahan yang lebih transparan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan penciptaan

lapangan kerja yang layak dapat membantu mengurangi dorongan untuk membangun pemukiman ilegal. Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas, seperti program peremajaan kota dan legalisasi bertahap pemukiman yang memenuhi standar keselamatan, dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pengusuran paksa (Durand-Lasserve & Royston, 2012).

Dengan strategi yang tepat dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, permasalahan pemukiman ilegal dapat diminimalkan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan perkotaan yang lebih tertata dan berkelanjutan.

## 2. 2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1.** Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vigiola, G. Q., & Morais, P. (2025) - Scopus	<i>Place and displacement: Out-of-place processes in low-income communities in Shanghai and Caracas/</i> Tempat dan pemindahan: Proses yang tidak sesuai	Kualitatif	- Penduduk memiliki hubungan yang kompleks dengan tempat tinggal mereka, dengan ikatan emosional yang kuat yang dimediasi oleh komunitas dan hubungan keluarga. - Proses pemindahan ini dikategorikan sebagai kekerasan lambat (slow violence), yang diperburuk oleh tindakan dan kelalaian

		dengan tempatnya di komunitas berpendapatan rendah di Shanghai dan Caracas		institusi, sehingga komunitas berpenghasilan rendah terus dipaksa keluar dari lingkungan mereka.
2	Halvorsen, S. (2024) -Scopus	<i>Slum upgrading and participation: Insights from a marginalized neighbourhood in Buenos Aires/</i> Peningkatan dan partisipasi permukiman kumuh: Wawasan dari lingkungan terpinggirkan di Buenos Aires	Kualitatif	- Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana partisipasi berperan dalam proses peningkatan kualitas lingkungan yang dilakukan dari pinggiran kota, terutama dalam konteks komunitas yang terpinggirkan dari agenda pemerintah kota. - Penelitian ini menolak dikotomi tradisional "top-down" vs. "bottom-up" dalam peningkatan permukiman kumuh dan menggantikannya dengan pendekatan relasional dan strategis terhadap transformasi perkotaan.
3	Ono, H., & Adrien, U. (2024)-Scopus	<i>Community-driven informal settlement</i>	Mixed Method (Network Analisis)	- Kebijakan peningkatan permukiman informal dan tata kelola pemerintahan di Rwanda mendukung upaya

		<p><i>upgrading as an everyday practice: The role of urban and governance policies/</i></p> <p>Peningkatan permukiman informal berbasis masyarakat sebagai praktik sehari-hari: Peran kebijakan perkotaan dan tata kelola</p>		<p>peningkatan berbasis komunitas, khususnya dalam pengembangan infrastruktur publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pengembangan infrastruktur dibagi antara pemilik tanah dan penyewa, yang menunjukkan adanya tanggung jawab kolektif dalam peningkatan permukiman.</li> <li>- Peningkatan permukiman berbasis komunitas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan ketika ada kolaborasi antara masyarakat, pasar, dan pemerintah. Dengan memasukkan permukiman informal ke dalam kebijakan tata kelola kota, upaya peningkatan dapat menjadi bagian dari praktik keseharian yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.</li> </ul>
4	Camacho, R., Aryal, J., & Rajabifard, A. (2024) -Scopus	<p><i>Disaster-induced disruption of policies for informal urban</i></p>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan yang ada tidak secara aktif melibatkan komunitas dalam proses perencanaan tata guna</li> </ul>

		<i>settlements/</i> Gangguan kebijakan permukiman informal perkotaan akibat bencana		lahan dan mitigasi bencana. - Kebijakan relokasi sering kali tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi warga, sehingga meningkatkan risiko pemiskinan dan ketidakstabilan setelah bencana. - Tidak adanya kebijakan terpadu yang secara khusus menargetkan pengurangan risiko bagi masyarakat permukiman informal.
5	Rodríguez, M. B., & Urdaneta Troconis, C. (2024) -Scopus	<i>Vulnerability and policies for informal urban settlements. The case of El Hatillo, Venezuela//</i> Kerentanan dan kebijakan untuk permukiman informal	Kualitatif	- Masyarakat memainkan peran dalam menciptakan dan memperparah kondisi kerentanan melalui pola pemukiman dan akses terhadap sumber daya. - Kebijakan di tingkat pemerintah kota (municipal policies) tidak cukup mengatasi atau mengurangi kerentanan di permukiman informal. - Pemerintah kota perlu

		perkotaan. Kasus El Hatillo, Venezuela		menerapkan kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi kerentanan, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan memperbaiki kondisi lingkungan di permukiman informal.
6	García, I., & Hernandez, N. (2023) -Scopus	<i>“They're Just Trying To Survive”</i> : <i>The Relationship Between Social Vulnerability, Informal Housing, And Environmental Risks In Loíza, Puerto Rico, USA/ “Mereka Hanya Berusaha Bertahan Hidup”</i> : Hubungan Antara Kerentanan Sosial, Perumahan Informal, Dan Risiko	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum dan kebijakan AS tidak secara eksplisit mengakomodasi perumahan informal, sehingga rumah-rumah ini sering kali tidak memenuhi syarat untuk bantuan pemulihan bencana.</li> <li>- Pemerintah lokal dan federal perlu mengubah pendekatan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di perumahan informal.</li> <li>- Menyesuaikan pendanaan pemulihan agar dapat membantu masyarakat informal tanpa menyebabkan penggusuran.</li> </ul>

		lingkungan di Loíza, Puerto Rico, AS		
7	Habibi, K., Arefi, M., Doostvandi, M., & Ashouri, K. (2022) -Scopus	<i>Reproduction of urban informality in Iran: Its key factors, tools and challenges</i> / Reproduksi informalitas perkotaan di Iran: Faktor-faktor utama, alat dan tantangannya	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan teknokratik dalam perencanaan kota sering kali bersifat rasional-instrumental tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat.</li> <li>- Kurangnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendorong mereka untuk membangun atau tinggal di permukiman informal.</li> <li>- Urbanisasi informal memperburuk degradasi lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkontrol.</li> </ul>

Berbagai penelitian telah menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan reproduksi permukiman informal di berbagai negara. Vigiola & Morais (2025) menyoroti proses pemindahan paksa di komunitas berpenghasilan rendah di Shanghai dan Caracas sebagai bentuk "kekerasan lambat" yang diperburuk oleh tindakan institusi. Halvorsen (2024) menolak dikotomi pendekatan "top-down" vs. "bottom-up" dalam peningkatan permukiman kumuh dan

menekankan pentingnya partisipasi komunitas dalam transformasi perkotaan yang lebih strategis. Sementara itu, Ono & Adrien (2024) menemukan bahwa kebijakan berbasis komunitas di Rwanda dapat berkontribusi terhadap peningkatan infrastruktur permukiman informal jika ada kolaborasi antara masyarakat, pasar, dan pemerintah. Namun, dalam konteks kebencanaan, Camacho et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan relokasi sering kali tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi warga, sehingga meningkatkan risiko pemiskinan dan ketidakstabilan.

Rodríguez & Urdaneta Troconis (2024) mengkritisi kurangnya efektivitas kebijakan tingkat kota dalam mengatasi kerentanan masyarakat di permukiman informal, menekankan perlunya kebijakan yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, García & Hernandez (2023) menyoroti bahwa kebijakan perumahan di AS tidak secara eksplisit mengakomodasi perumahan informal, sehingga komunitas tersebut sering kali terpinggirkan dari bantuan pemulihan bencana. Habibi et al. (2022) mengkaji reproduksi informalitas perkotaan di Iran, menemukan bahwa pendekatan teknokratik dalam perencanaan kota sering kali mengabaikan aspek sosial dan berkontribusi terhadap pembangunan yang tidak terkontrol serta degradasi lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, partisipasi komunitas, dan aspek sosial-politik memainkan peran signifikan dalam dinamika permukiman informal, dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 1.** Kerangka Pemikiran

Sumber: Penelitian Terdahulu

Kerangka konseptual dalam penelitian "Strategi Pemerintah Kota Batam dalam Perbaikan Permukiman Perkotaan Ilegal" menggambarkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi permukiman ilegal serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya. Permukiman ilegal di Kota Batam umumnya berkembang tanpa perencanaan yang terstruktur, sering kali berdiri di atas lahan

tanpa kepastian hukum, dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Untuk menangani permasalahan ini, terdapat empat faktor utama yang menjadi fokus utama, yaitu kebijakan perumahan, infrastruktur publik, kebijakan ekonomi, serta kebijakan sosial dan lingkungan.

Kebijakan perumahan berperan dalam mengatur legalitas lahan, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, serta program relokasi atau perbaikan kualitas permukiman yang telah ada. Infrastruktur publik menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga, mencakup pembangunan akses jalan, transportasi, drainase, serta penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, kebijakan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor usaha kecil, dukungan terhadap sektor informal, akses permodalan, serta pelatihan keterampilan kerja. Sementara itu, kebijakan sosial dan lingkungan menekankan edukasi, peningkatan peran serta masyarakat, serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sehat melalui pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran.

Keempat faktor ini saling berhubungan dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya perbaikan permukiman ilegal di Kota Batam. Perbaikan hunian yang layak perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, kebijakan sosial yang inklusif, serta pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terpadu dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, diharapkan strategi perbaikan permukiman ilegal dapat berjalan secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih tertata,

nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Batam.